



Reklamasi Teluk

Benoa

Bencana Ekologis bagi Bali

Bukan rahasia umum lagi jika pariwisata di Bali mengandalkan pariwisata budaya, yang mengekspos budaya Bali sebagai produk utamanya. Namun, tidak terjadinya keseimbangan dalam pemanfaatan ekspos pariwisata dengan kehidupan masyarakat Bali, hal yang kini lebih diperhatikan pemangku kebijakan adalah bagaimana memanfaatkan budaya demi pariwisata, bukan lagi menilai dampak pariwisata terhadap kebudayaan di masyarakat. Kini Bali dihadapkan pada proyek Reklamasi Teluk Benoa yang banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat tidak hanya di Bali, melainkan dari hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air). (Wisnu Suharto dalam Maskur, 2008). Desain reklamasi ini sendiri ternyata sudah dibuat pada tahun 2007

lalu. Pembuat desain reklamasi pulau ini, yakni Tilke Engineers & Architects, merupakan perusahaan kelas dunia asal Jerman yang didirikan tahun 1983. Perusahaan ini biasa menangani desain untuk berbagai proyek di berbagai belahan dunia seperti proyek hotel di Bahrain, di Shanghai Cina, dan berbagai proyek di belahan dunia lainnya (*beritabali.com*). Namun sejatinya, proyek reklamasi tentu akan berdampak langsung pada lingkungan, ekonomi, sosial dan roh dari pariwisata kita, yakni yang berupa Pariwisata Budaya. Beberapa alasan reklamasi tidak cocok diterapkan di pulau Bali:

Perpres yang Mengganggu

Jika hanya melihat dari keuntungan di bidang ekonomi, tindakan pemerintah untuk menyetujui reklamasi ini saya rasa kurang tepat. Daerah Teluk Benoa yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Perpres No. 45 tahun 2011 sebelum diubah menjadi Perpres No. 51 tahun 2014 menjadi salah satu tempat mata pencaharian nelayan setempat. Daratan baru yang akan dibuat tentunya akan mengorbankan kehidupan para nelayan tersebut, tidak ada lagi daerah tangkapan ikan yang mudah dijangkau. Akibatnya jika terus dibiarkan, perubahan kehidupan masyarakat dengan profesi nelayan pun terjadi, dimana dengan tantangan yang begitu sulit untuk menangkap ikan, tidak menutup

kemungkinan bahwa tidak ada lagi warga sekitar yang ingin melaut. Pasar-pasar ikan tradisional disekitar wilayah tersebut juga terancam punah. Tidak ada lagi ikan segar yang dapat diperjualbelikan. Tingginya harga jual ikan oleh nelayan di wilayah Benoa akibat peningkatan biaya untuk melaut mendorong terjadinya kebangkrutan nelayan setempat.

Adat

Reklamasi tentu berdampak terhadap kehidupan adat istiadat beragama di Bali khususnya di daerah Teluk Benoa. Salah satu contoh yang dapat diambil yakni rentetan upacara pemakaman di Bali untuk umat Hindu adalah mengembalikan jasad ke lima unsur pembentuknya, salah satunya adalah air yang dilambangkan dengan membuang hasil pembakaran jenazah ke laut. Jika reklamasi ini benar dilaksanakan dapat dibayangkan penduduk yang berada di sekitar teluk benoa yang biasanya melaksanakan upacara "ngaben" harus mendapat ijin khusus dari pemilik hotel ataupun resort untuk menyelesaikan rentetan upacara itu akibat wilayah tersebut sudah diprivatkan. Atau jika tidak, maka ada usaha lebih yang harus dilakukan untuk berpindah tempat ke pantai lain yang tentunya menempuh perjalanan yang lebih jauh dan melibatkan banyak orang ini sehingga membutuhkan biaya lebih. Sejatinya, Bali tidak memerlukan



SAMBUNGAN - - -

wisata buatan, tetapi yang lebih penting yakni pengembangan pariwisata budaya yang tentunya menjadi roh pariwisata yang ada di Bali. Bali memang tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan yang dialami pariwisata negara-negara tetangga. Namun pemerintah tidak seharusnya hanya menyerahkan kepada investor dalam perencanaan pengembangan pariwisata sehingga harus menempatkan investasinya di wilayah yang merugikan baik dari segi aspek lingkungan, budaya, sosial dan ekonomi bagi kelangsungan Bali ke depan. Pembangunan di Bali harus senantiasa berlandaskan konsep Tri Hita Karana sehingga mampu menjaga keharmonisan jangka panjang yang mampu dirasakan oleh generasi penerus Bali nantinya. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat lahir langsung dari inisiatif Desa Pakraman maupun krama banjar melalui pengembangan desa wisata melalui dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah sehingga manfaatnya dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Karena wisatawan datang ke Bali adalah untuk mencari kebudayaan Bali itu sendiri.

Konservasi

Ada baiknya kita melihat kebelakang terkait dengan reklamasi Serangan sebagai acuan untuk merefleksikan pikiran kita terhadap dampak reklamasi teluk benoa, kita bisa melihat bahwa kini sudah sangat sedikit warga sekitar yang

berprofesi sebagai nelayan, hal tersebut juga merupakan dampak dari ikan-ikan yang sebelumnya berkembang biak disana sudah menghilang dari perairan Serangan. Begitu pula dengan kehidupan pulau penyu disana, sudah sangat jarang penyu-penyu ingin menaruh telur mereka di pesisir pantai. Pulau Serangan sudah menjadi satu daratan dengan pulau-pulau kecil sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pantai yang landai, alami dan aman untuk habitat Penyu bertelur. Reklamasi tersebut tentu tidak memiliki tujuan yg jelas bagi kehidupan masyarakat maupun lingkungan disana. Berdasarkan kajian pakar Hidrologi dari Universitas Udayana, I Nyoman Sunarta, reklamasi Teluk Benoa tentu akan menimbulkan bencana ekologis. Alasannya jika reklamasi tetap dilaksanakan, maka akan terjadi perubahan arus air laut di sekitar perairan tersebut. Dampak paling nyata yang dapat dirasakan adalah semakin memperparah terjadinya abrasi di sejumlah pantai di sekitar Teluk Benoa. Indonesia Maritime Institute (IMI) menegaskan, reklamasi di Teluk Benoa berpotensi merusak ekosistem terumbu karang yang selain sebagai penopang kehidupan jutaan biota laut, juga menjadi andalan wisata bahari di Pulau Bali, jika reklamasi dilakukan maka tentu sedimentasi yang ditimbulkan akan mematikan terumbu karang dan biota lainnya. Teluk Benoa

dikelilingi oleh daratan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan, kemudian bila latar belakang reklamasi yang diutarakan untuk menjaga Bali dari bahaya tsunami atau gelombang pasang, tentunya tidak beralasan karena yang akan lebih dahulu dihantam oleh tsunami (bila benar terjadi) adalah dua pulau tersebut yaitu daratan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan. Selain itu, kawasan Teluk Benoa juga merupakan Green Nature Garden, yang berarti bahwa mangrove hanya dapat tumbuh di kawasan tersebut.

Budaya

Begitu banyak dampak yang ditimbulkan oleh reklamasi terhadap kehidupan masyarakat Bali. Kami tidak butuh pertambahan jumlah pariwisata yang ada, apalagi jika harus mengorbankan pariwisata budaya kami. Bali membutuhkan peningkatan kualitas pariwisata budayanya, peningkatan yang didukung oleh pemerintah, bukan penambahan jenis pariwisatanya. Selama ini Bali mampu menjadi tujuan pariwisata dari berbagai macam negara hanya karena budaya dan keindahan alamnya yang tidak dapat ditemukan di negara manapun di seluruh dunia, jadi jangan rusak Bali kami dengan cara yang mengatasnamakan pertumbuhan pariwisata.

●IB Yogi Pranaditha

Edisi : Minggu, 22 November 2015

Hal : 4



Sambutan...



BPM/ist

PARIWISATA sudah sangat jelas menjadi nafas dan urat nadi bagi pulau tercinta kita ini. Hal tersebut terjadi karena pariwisata dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian di Bali. Akan tetapi, pariwisata pada umumnya memang bagaikan pedang bermata dua bagi yang menjalankan. Terlebih dengan pemanfaatan kebudayaan sebagai penopang utama dalam pengembangan pariwisata khususnya di Bali. Sehingga tidak jarang dikatakan bahwa pariwisata merupakan senjata bagi kaum kapitalis untuk menghancurkan budaya itu sendiri.

Edisi : Minggu, 22 November 2015

Hal : 4



Debat Pilkada Badung Telan Rp 800 Juta

Karena Biaya Siaran Langsung di Tiga TV Besar

MANGUPURA - Debat publik calon Bupati/Wabup Badung menelan dana cukup besar. Data yang didapat koran ini menyebutkan, debat publik menghabiskan dana Rp 800 juta lebih. Anggaran tersebut sekaligus menjadikan anggaran debat publik terbesar di Bali. Ketua KPUD Badung, AA Gede Raka Nakula saat dikonfirmasi tak menampik besarnya anggaran debat publik tersebut.

"Di Badung lebih besar

dibandingkan kabupaten lain karena biaya siaran langsung yang besar. Kami disiarkan langsung tiga stasiun televisi sekaligus. Kalau kabupaten lain hanya satu televisi," papar Nakula kemarin (21/11).

Nakula mempunyai alasan kenapa harus tiga stasiun televisi sekaligus. Tujuan penyiaran tiga stasiun televisi sekaligus menurut Nakula untuk memberikan informasi secara luas pada masyarakat. Nakula menilai semakin banyak stasiun televisi yang menyiarkan, maka semakin banyak orang yang melihat. Sehingga penyampaian misi dan visi kandidat bisa tersampaikan.

KPUD sebagai penyelang-



Debat publik itulah momen kami memberikan informasi pada masyarakat. Kalau ditambah pajak habisnya bisa Rp 800 juta lebih."

AA GEDE RAKA NAKULA
Ketua KPUD Badung

gara pemilu, terang Nakula, hanya memiliki satu kesempatan menyampaikan misi dan visi para kandidat. Yakni melalui debat publik. Karena itu momen debat publik dimanfaatkan sebaik mungkin. "Debat publik itulah momen kami memberikan informasi

pada masyarakat. Kalau ditambah pajak habisnya bisa Rp 800 juta lebih," beber mantan aktivis kepemudaan itu.

Ditanya pola debat yang banyak menerima kritikan dari publik, Nakula menyatakan tidak akan mengubah pola debat. Debat terakhir yang



akan digelar pada 25 November mendatang akan melibatkan pasangan calon (paslon) Nyoman Giri Prasta - Ketut Suiasa (GiriAsa), dengan Made Suidiana - Nyoman Sutrisno (Su-Su). Debat terakhir itu juga akan disiarkan langsung tiga stasiun televisi lokal. "Tidak ada yang berubah. Pola debat tetap sama," pungkas Nakula.

Sedangkan surat suara untuk pilkada Kota Denpasar sudah tiba di KPUD Kota Denpasar, Sabtu pagi kemarin (21/11). Untuk pendistribusian ke desa-desa dan kecamatan, paling lambat pada 5 atau 6 Desember. "Paling lambat H-3 terdistribusi," ujar Ketua KPU Denpasar, I Gede John Dar-

mawan. Lanjutnya, total ada 43 desa di empat kecamatan yang ada di Denpasar.

Dari data yang diperoleh, surat suara yang sudah ada di KPUD Denpasar adalah sebanyak 206 dus yang masing-masing berisi 2100 lembar serta satu dus berisi 631 lembar. Untuk pemilu ulang, tambahnya, KPU sudah menyiapkan 2000 lembar surat suara tambahan. Kotak suara yang tersedia sejumlah 813 kotak suara dan kotak suara tambahan untuk rekapitulasi suara di kecamatan. Nantinya pendistribusian surat suara akan didistribusikan secara merata.

"Mekanismenya adalah melalui PPK lalu didistri-

busikan ke desa-desa," katanya.

Pihak kepolisian juga akan terlibat dalam pendistribusian surat suara, agar tidak terjadi kecurang-kecurangan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Menurutnya, sampai saat ini ada sebanyak 422.294 DPT yang terdaftar dan ada penambahan sebanyak 144 DPT.

Bagaimana meminimalisir golongan putih (golput)? John Darmawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke banjar-banjar. Pada 7 Desember nanti, sosialisasi ke pasar-pasar serta pada 8 Desember sosialisasi menggunakan mobil keliling. (san/lit/djo)



Realisasikan Hibah dan Bansos Perlu Keberanian Pj. Bupati Terbitkan Perbup

Bangli (Bali Post) -

Keberanian Penjabat (Pj.) Bupati untuk menerbitkan Perbup tentang pencairan dana hibah dan bansos (bantuan sosial) sangat diharapkan dewan. Pasalnya dana hibah dan bansos (bantuan sosial) di Bangli akan bisa cair bila ada Peraturan Bupati (Perbup) yang melandasinya.

Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Jumat (20/11) mengatakan, dengan sudah diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pencairan tersebut maka masalah pencairan dana hibah dan bansos sudah tidak ada lagi. Berpatokan

dengan Pergub, sebenarnya Pemerintah Kabupaten bisa menindaklanjutinya dengan membuat peraturan bupati (Perbup) agar dana hibah dan bansos bisa cair. "Sekarang tergantung keberanian Pak Penjabat Bupati untuk menerbitkan Perbup Pemprov saja

bisa, kenapa kita di kabupaten tidak," terangnya.

Dijelaskan politisi PDI-P ini, dilihat dari komposisi keuangan daerah, pemberian dana hibah dan bansos ke masyarakat masih sangat memungkinkan. Oleh karenanya pihaknya bakal mengajak eksekutif untuk ber-

bicara membuat payung hukum. Hal ini dilakukan agar hibah bansos bisa dicairkan. "Sejauh ini pembicaraan resmi belum kami lakukan dengan eksekutif. Tetapi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) itu sudah sempat dibahas," ujarnya.

Ditambahkan bahwa dari rancangan Rp 1 triliun APBD Bangli 2016, Rp 13 miliar lebih diplot untuk dana hibah dan Rp 500 juta untuk bansos. Jumlah itu baru mencakup lembaga

yang berbadan hukum seperti WHDI, PMI, KNPI dan lembaga lainnya. Belum aspirasi Bupati, Wabup dan DPRD.

Dikatakan juga untuk kelembagaan yang berada di bawah naungan desa pakraman seperti organisasi pecahang termasuk sekaa teruna-teruni, Kutha Parwata mengatakan tidak membutuhkan SKP dari Kantor Kesbangpolinmas. Sehingga mereka dikatakan bisa menerima hibah bansos. (kmb40)